

STRATEGI PENGENTASAN PENGANGGURAN DAERAH RELIGI

(Studi di Kabupaten Pandeglang, Indonesia)

Agus Lukman Hakim¹, Dirlanudin², Agus Sjafari³, Atik Atiatun Nafisah⁴, Ade Hadiono⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten^{1,4,5}

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{2,3}

Email Korespondensi: aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id¹

Riwayat Artikel

Dikirim: 25 Agustus 2022

Direvisi: 21 November 2022

Diterima: 12 Desember 2022

Abstract

Pandeglang Regency community is an area that has a high level of religiosity. The high spirit of religion has positive and negative impacts. One negative impact is the development of a culture of fatalism, which has an impact on a low work ethic and the amount of underemployment. This study is a follow-up study that aims to analyze the problem of the reality of unemployment with a socioeconomic approach and analyze the priority of unemployment alleviation strategies in religious areas. This research is a descriptive research. Data collection techniques with expert judgment and interviews, through a purposive sampling method. Secondary data used from related institutions / agencies in the Regional Government of Pandeglang Regency. The analysis technique used with descriptive analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that The priority strategy in reducing unemployment refers to the following criteria: First is increasing the competency of the workforce; Second, expansion of employment opportunities; Third, Development of the Labor Market; Fourth, population control.

Keywords: Unemployment, Religious Areas, Fatalism, Strategy

Abstrak

Masyarakat Kabupaten Pandeglang merupakan masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Tingginya semangat religi memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya budaya fatalism, yang berdampak pada etos kerja yang rendah dan besarnya pengangguran terselubung. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan realitas pengangguran dengan pendekatan sosioekonomi serta menganalisis prioritas strategi pengentasan pengangguran di wilayah religi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan expert judgment dan wawancara, melalui metode purposive sampling. Data sekunder yang digunakan dari instansi/dinas terkait di Pemda Kabupaten Pandeglang. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis deskriptif dan Analytical Hierarchy Proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi prioritas dalam penurunan pengangguran mengacu pada kriteria: Pertama peningkatan kompetensi tenaga kerja; Kedua, Perluasan kesempatan kerja; Ketiga, Pengembangan Pasar Kerja; Keempat, Pengendalian penduduk.

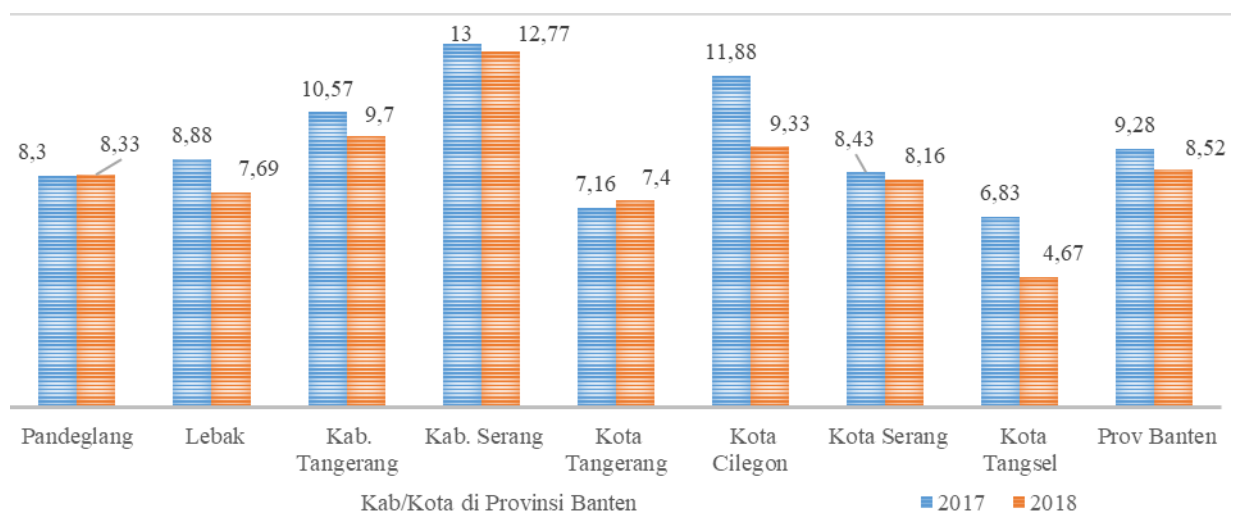
Kata kunci: Pengangguran, Daerah religi, Fatalism, Strategi

PENDAHULUAN

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan wilayah religius dengan basis islam. Kekhasan simbol agama tersebut diindikasikan dari banyaknya destinasi wisata religi (Fachri 2018). Keberadaan citra religi memiliki nilai positif bagi pengembangan masyarakat dan wisata religi. Walaupun demikian, simbolisme agama terkadang memiliki dampak negatif akibat kesalahan memahami pada dogma ajaran agama tertentu. Kondisi tersebut salah satunya menimbulkan budaya fatalism (menerima apa adanya tanpa usaha yang maksimal) dari sebagian masyarakat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Yazid 2007). Kondisi tersebut bisa menimbulkan kontraproduktif terhadap semangat pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang mendorong hadirnya investasi sector swasta. Kehadiran investasi diharapkan mampu mendorong perekonomian suatu wilayah (Aqil 2014). Sikap yang cenderung berbenturan dengan pengembangan perekonomian tersebut berdampak pada banyaknya pengangguran. Penyebabnya bukan hanya karena factor rendahnya peluang kerja dibandingkan jumlah tenaga kerja (Rizka 2014) tetapi juga sikap dan karakteristik masyarakat yang kurang tepat dalam memahami ajaran agama. Kondisi tersebut berbeda dengan hasil kajian Singgaleng (2020) yang menjelaskan masyarakat yang religius dengan ritual keagamaan yang tinggi dapat mendukung pengembangan pembangunan di wilayah perdesaan.

Kesalahan interpretasi keagamaan yang negatif tersebut terkadang menjadi persoalan pada pengembangan ekonomi wilayah. Salah satunya terkait dengan besarnya tingkat pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2018), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2017, dari Kabupaten Serang 13% dan Cilegon sebesar 11,8% atau daerah industri perkotaan (Arumningtyas, 2014), Sedangkan penyumbang angka TPT terendah adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 6,83%, Gambar 1.

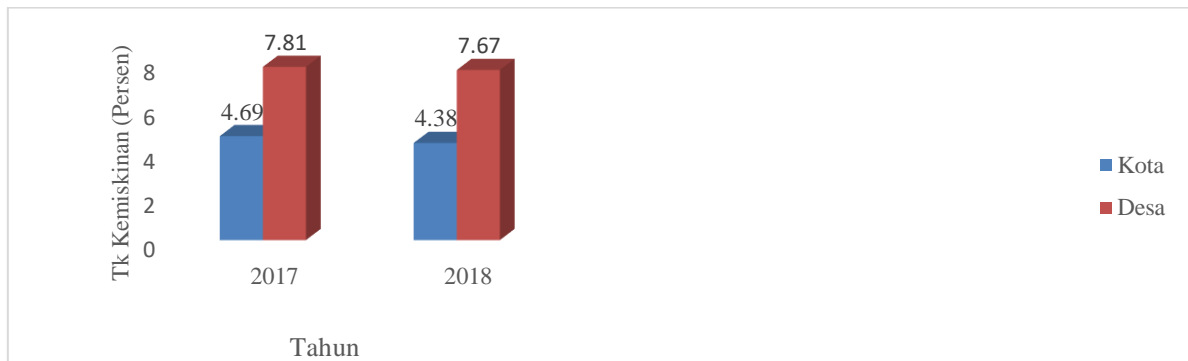
Gambar 1. Persentase Pengangguran di Provisi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019

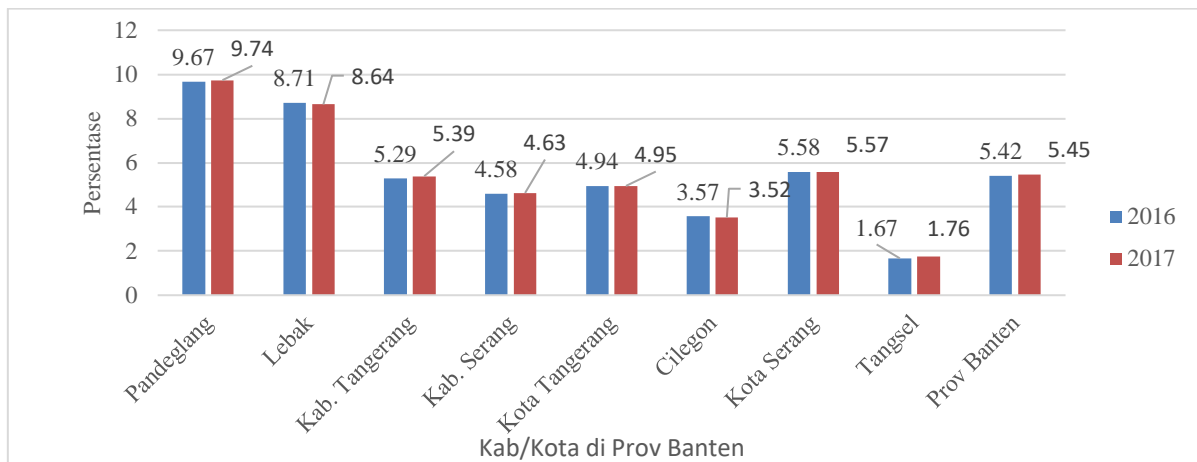
Kabupaten Pandeglang berdasarkan data BPS Provinsi Banten (2019) tersebut termasuk daerah yang berkontribusi relatif rendah pada pengangguran terbuka. Walaupun demikian, Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mayoritas perdesaan sebagaimana kabupaten Lebak memiliki kontribusi kemiskinan yang sangat besar di Provinsi Banten sebagaimana Gambar 2&3.

Gambar 2. Perbandingan Persentase Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019

Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019

Banyaknya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang dan umumnya wilayah perdesaan disebabkan karena masih banyaknya pengangguran terselubung atau bekerja paruh waktu (Hartina 2007) sehingga menuntut adanya pola dan strategi baru dalam pengentasan pengangguran. Pola tersebut setidaknya mengkaji pengangguran dengan persepektif yang berbeda dari sebelumnya, yang biasanya lebih fokus pada kajian ekonomi makro. Penelitian Kusuma (2016) mengklasifikasikan penyebab utama pengangguran pada pendekatan ekonomi, sosiologi maupun psikologi. Berdasarkan faktor penyebab pengangguran tersebut, selanjutnya dianalisis berbagai strategi dalam mengurangi pengangguran. Salah satu kajian yang dilakukan Budiani (2013) membagi

strategi mengatasi pengangguran menjadi tiga aspek. Pertama, strategi penguatan sisi permintaan tenaga kerja. Kedua, strategi sisi penawaran tenaga kerja. Ketiga, Strategi pengembangan pasar kerja

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Kusuma (2016) mengklasifikasikan penyebab utama pengangguran pada pendekatan ekonomi, sosiologi maupun psikologi. Berdasarkan faktor penyebab pengangguran tersebut, selanjutnya dianalisis berbagai strategi dalam mengurangi pengangguran. Salah satu kajian yang dilakukan Budiani (2013) membagi strategi mengatasi pengangguran menjadi tiga aspek. Pertama, strategi penguatan sisi permintaan tenaga kerja. Kedua, strategi sisi penawaran tenaga kerja. Ketiga, Strategi pengembangan pasar kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik Purposive Sampling. Data diperoleh melalui: angket dan wawancara terbuka terhadap expert yang ditetapkan. Yang terdiri dari Dinas/Instansi di Pemda Kabupaten Pandeglang yang memiliki peran/tugas pengurangan pengangguran; Anggota DPRD Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja, Tokoh Masyarakat, Pengusaha, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan jumlah 18 responden. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, studi dokumentasi dan kertas kerja pejabat atau petugas lainnya yang relevan dengan kajian pengangguran di Kabupaten Pandeglang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan digunakan: a) Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2003). Dalam analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan menggambarkan masing-masing peubah berdasarkan indikatornya masing-masing dengan dilakukan pengkategorian. b) Analytical Hyrarcy Proces (AHP). Analisis strategi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan digunakan alat analisis *Multi Criteria Analysis* (MCA), dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan mengacu pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Perbandingan Berpasangan Antara Variabel

Skala	Definisi
1	Kedua elemen sama pentingnya (<i>equality importance</i>) terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen lainnya (<i>Moderately Importance</i>)
5	Elemen satu lebih penting daripada elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada elemen lainnya (<i>Very Strongly importace</i>)
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya (<i>Extremely importance</i>)
2, 4, 6 dan 8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan (<i>Intermediate Value</i>)
ke balikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka jika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan i

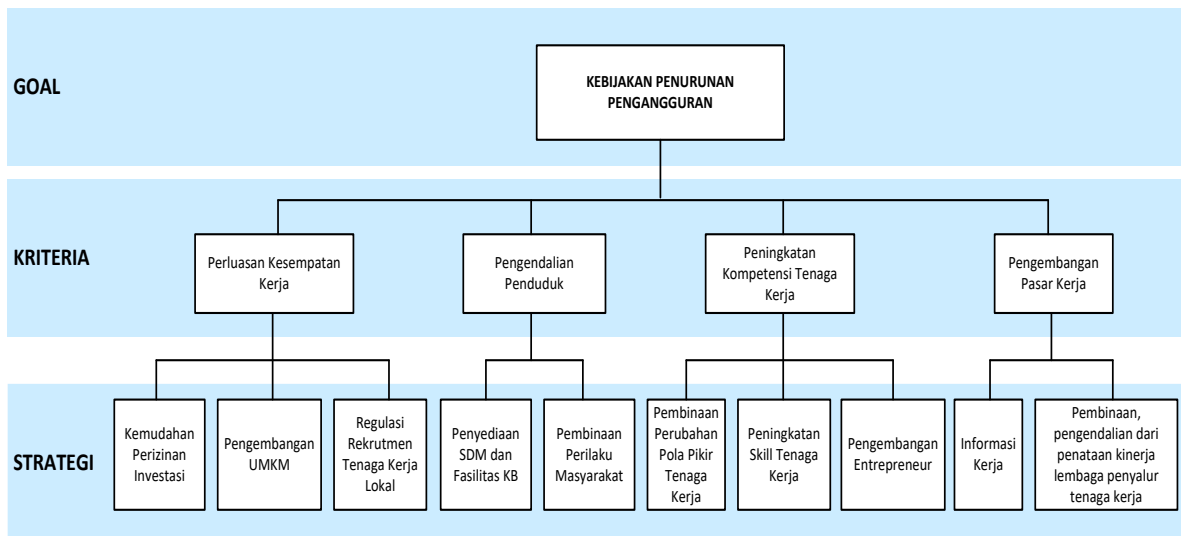
Sumber: Saaty (1993)

Analytical Hierarchy Process (AHP) diperlukan untuk mengetahui elemen-elemen kunci yang perlu ditangani. Tujuannya adalah agar persoalan kompleks dapat disederhanakan sehingga cepat dalam pengambilan keputusan. Dasar acuan dalam AHP adalah hasil pendapat para ahli yang berkompeten di bidangnya. Untuk mengetahui prioritas strategi kebijakan yang efektif dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang dengan mengacu pada strategi pengurangan pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun AHP dengan mengacu pada Saaty (1993).

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi masalah
2. Menyusun stuktur hirarki yang diawali tujuan umum, kriteria, dan alternatif pada tingkatan terbawah.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing kriteria di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya.
4. Melakukan perbandingan berpasangan agar memperoleh *judgement* seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1)]/2$, dengan nilai n ialah jumlah elemen yang dibandingkan.

5. Menghitung nilai *Eigen* dengan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulang.
6. Menghitung langkah 3, 4, 5 untuk setiap hirarkhi.
7. Menghitung *vector Eigen* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *vector eigen* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini mensintesis judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan umum (utama).
8. Mengevaluasi dan memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilai lebih besar dari 10%, maka penilaian data judgement harus diperbaiki.
9. Setelah melaksanakan tahapan-tahapan dalam AHP, maka dimasukkan nilai numerik perbandingan dari skala 1 sampai 9 yang ditetapkan sebagai pertimbangan dalam membandingkan nilai berpasangan suatu elemen dengan elemen lainnya sebagaimana Gambar 4.

Gambar 4: Hirarki Kebijakan Penurunan Pengangguran



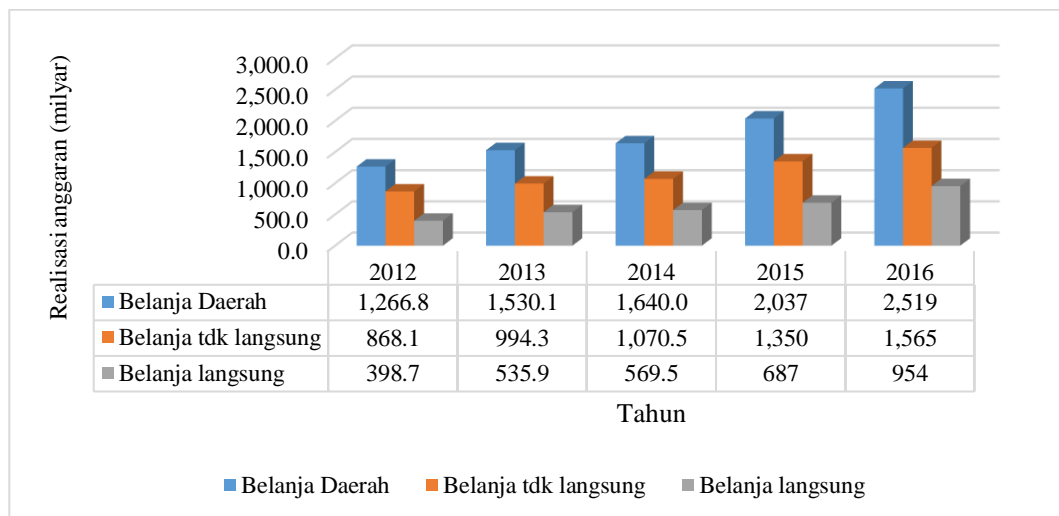
PEMBAHASAN

Dalam upaya mengurangi pengangguran di Kabupaten Pandeglang diperlukan berbagai strategi dan peran berbagai aktor yang dilibatkan. Strategi pertama yang bisa dijalankan adalah strategi penguatan sisi permintaan tenaga kerja. Strategi ini melalui penguatan sisi permintaan, melalui percepatan perluasan kesempatan kerja dengan perluasan investasi. Strategi kedua, strategi sisi penawaran tenaga kerja. Pada strategi ini dilakukan upaya pengendalian laju penduduk dan pengembangan keterampilan para pencari kerja. Adapun strategi ketiga, pengembangan pasar kerja. Kegiatan yang dilakukan

adalah pengembangan informasi pasar kerja, pengendalian dan pembinaan penyalur tenaga kerja, dan juga penataan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja.

Pengembangan ketiga strategi tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, waktu yang cukup lama dan keterlibatan berbagai aktor untuk melakukan koordinasi. Oleh karena itu, perlu adanya skala prioritas strategi dan kebijakan yang mesti dijalankan karena Kabupaten Pandeglang memiliki *space fiscal* yang rendah dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Kabupaten Pandeglang. karena alokasi dana APBD didominasi alokasi belanja tak langsung (60-70 persen) untuk belanja pegawai sesuai gambar 5.

Gambar 4. Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang



Sumber: BPKD Kab. Pandeglang 2016 (diolah)

1. Prioritas kriteria dalam kebijakang penurunan Pengangguran

Kebijakan penurunan pengangguran di Kabupaten Pandeglang memiliki kriteria perluasan kesempatan kerja, pengendalian penduduk, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja. Berdasarkan hasil pengolahan software *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan jawaban 18 pakar diperoleh hasil sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2: Bobot setiap Kriteria terhadap Tujuan Kebijakan Penurunan Pengangguran

Kriteria	Bobot	Prioritas
Perluasan Kesempatan Kerja	0.303	2
Pengendalian Penduduk	0.153	4
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	0.325	1
Pengembangan Pasar Kerja	0.220	3

Consistency ratio = 0.00

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR)* < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. Kriteria peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan prioritas pertama dengan bobot sebesar 0.325. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Pemerintah telah mengeluarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dinyatakan perlunya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; dan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja telah mengeluarkan standar kompetensi SKKNI.

Urgensi kompetensi tenaga kerja karena tenaga kerja kini telah memasuki kompetisi yang sudah luas adanya ASEAN Economic Community (AEC) sejak tahun 2015. Telah tercipta kondisi *single market and production base*, yang akan terdiri dari lima elemen, antara lain: aliran bebas barang, bebas aliran jasa, aliran bebas investasi, arus modal yang lebih bebas, dan arus 2 bebas tenaga kerja terampil. Tentu dengan adanya AEC, arus perpindahan tenaga kerja antar negara akan lebih marak terjadi. Selain adanya AEC, adanya struktur dasar dari persetujuan *World Trade Organization (WTO)* yang mencakup barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa, menjadi sebuah concern yang akan berdampak pula pada kondisi perdagangan di Indonesia. Dengan semakin tingginya tuntutan dunia, hal ini tentu mengkhawatirkan bila tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kompetensi yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketidaktersediaan tenaga kerja yang berkompeten akan membuat perusahaan-perusahaan terpaksa menggunakan tenaga kerja asing. Hal ini tentu akan merugikan pada sektor ketenagakerjaan Indonesia.

Prioritas kedua yaitu perluasan kesempatan kerja dengan bobot sebesar 0.303. Upaya perluasan kesempatan kerja bisa dilakukan dengan memberikan akses yang mudah bagi swasta dalam melakukan investasi. Penelitian Irpan (2016) menunjukkan adanya pengaruh negative antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka. Investasi merupakan indikator kembangnya perekonomian di suatu wilayah yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (output) dan output tersebut salah satunya dihasilkan oleh tenaga kerja (Safina dan Rahayu 2011). Selain itu, pemerintah perlu memberikan daya dukung bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Walaupun pengembangan ekonomi masyarakat sering mengalami berbagai kendala dan berkontribusi rendah bagi perekonomian (Ikhsan 2004). Penelitian Romhadhoni et al (2018); Seran (2017) juga menunjukkan adanya ketidakrelevanan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2018, di Provinsi Jakarta pertumbuhan ekonomi meningkat namun diiringi juga dengan besarnya tingkat pengangguran terbuka.

Prioritas ketiga, yaitu pengembangan pasar kerja dengan bobot sebesar 0.220. Pengembangan pasar kerja berupa ekspansi Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Persoalannya terletak pada kompetensi TKI yang masih terbatas sehingga masih ditempatkan sebagai tenaga kerja kasar. Hasil penelitian Kristina (2012), 70 persen Tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri bekerja di sektor informal, mengalami kendala bahasa, benturan budaya serta tidak memiliki skill dan pendidikan yang memadai.

Prioritas keempat yaitu pengendalian penduduk dengan bobot sebesar 0.153. Pengendalian penduduk dipilih oleh para ahli sebagai pilihan terakhir karena pola pengendalian penduduk melalui Keluarga berencana yang dijalankan di Indonesia bersifat Top down dan mengabaikan hak-hak reproduksi dan kesehatan perempuan. Hal tersebut juga diperkuat dengan konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo tahun 1994 dan Konferensi Dunia mengenai Perempuan dan Pembangunan di Beijing 1995. Pada masyarakat kelas menengah dan terdidik di Indonesia juga tidak mempersoalkan lagi kuantitas anak tetapi pada kualitas keluarga dalam membina dan mendidik agar tumbuh dan berkembang sehingga siap berkompetisi.

2. Strategi Prioritas Dalam Penurunan Pengangguran dan Peran Dinas/Instansi Pemda Pandeglang

Berdasarkan sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, strategi penurunan pengangguran dengan basis kriteria peningkatan kompetensi tenaga kerja diperoleh strategi prioritas sesuai Tabel 3.

Tabel 3: Bobot setiap Strategi terhadap Kriteria Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Kriteria	Bobot	Prioritas
Pembinaan Perubahan Pola Pikir Tenaga Kerja	0.325	2
Peningkatan Skill Tenaga Kerja	0.323	3
Pengembangan Entrepreneur	0.352	1

Consistency ratio = 0.01

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR)* < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. Berdasarkan Kriteria peningkatan kompetensi tenaga kerja, strategi yang menjadi prioritas utama yaitu pengembangan entrepreneur dengan bobot sebesar 0.352. Strategi prioritas kedua yaitu pembinaan perubahan pola pikir tenaga kerja dengan bobot sebesar 0.325. Strategi prioritas ketiga yaitu peningkatan skill tenaga kerja dengan bobot sebesar 0.323.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu memfasilitasi pengembangan wirausaha baru di tengah kondisi lesunya perekonomian pada tingkat nasional dan

lokal. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh melambat sejak Tahun 2015 Sebesar 4,88 Persen, 2016 sebesar 5,02 Persen, 2017 sebesar 5,07 persen, 2018 kuartal II 5,27 (BPS RI 2015-2018) menuntut adanya penguatan pengembangan produk lokal yang memiliki *value added* tinggi dengan hadirnya wirausaha yang produktif dan ekspansif. Kabupaten Pandeglang memiliki potensi SDA yang besar dan kaya akan potensi unggulan yang bisa dikembangkan. Studi hakim (2017) menunjukkan perlu adanya pengembangan produk unggulan dengan berbasis pada partisipasi masyarakat sehingga keberadaan produk merupakan kreasi dan memiliki dampak bagi masyarakat pandeglang yang umumnya berada di perdesaan.

Adapun Dinas/instansi perlu terlibat dalam melaksanakan strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja adalah sesuai tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4: Peran Dinas / Instansi dalam peningkatan kompeten tenaga kerja

Dinas/Instansi	Tugas Dinas/Instansi
Dinas Koperasi dan UMK	Melakukan peningkatan capacity building, salah satunya pelatihan entrepreneurship (pelatihan motivasi, manajemen pemasaran, keuangan, IT, mencari investor).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Melalui Balai Latihan Kerja melakukan Pemetaan potensi bisnis unggulan, Pelatihan kompetensi tenaga teknis yang menunjang potensi bisnis unggulan; pelatihan industry kreatif.
Dinas Sosial	Mengembangkan entrepreneurship pada organisasi karang taruna dan keluarga penerima program keluarga harapan (PKH)
Dinas Pemuda dan Olah raga	Membangun kemandirian pendapatan melalui bakat dan potensi yang dimiliki
Dinas Pariwisata	Mengembangkan ekonomi kreatif dengan melibatkan para pemuda yang belum memperoleh pekerjaan di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan kriteria perluasan kesempatan kerja, diperoleh prioritas strategi penurunan pengangguran sesuai Tabel 5.

Tabel 5: Bobot setiap Strategi terhadap Kriteria Perluasan Kesempatan Kerja

Kriteria	Bobot	Prioritas
Kemudahan Perizinan Investasi	0.512	1
Pengembangan UMKM	0.347	2
Regulasi Rekrutmen TK Lokal	0.141	3

Consistency ratio = 0.00

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR)* < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. Berdasarkan Kriteria Perluasan Kesempatan Kerja, strategi yang menjadi prioritas utama yaitu kemudahan perizinan investasi dengan bobot sebesar 0.512. Strategi prioritas kedua yaitu pengembangan UMKM dengan bobot sebesar 0.347. Strategi prioritas ketiga yaitu regulasi rekrutmen TK lokal dengan bobot sebesar 0.141.

Para pakar memandang perlu adanya deregulasi perizinan pada investasi sektor swasta karena perizinan yang ada masih dikesankan berbagai kalangan mempersulit peluang usaha. Dampaknya pihak swasta enggan untuk menanam investasi di Kabupaten Pandeglang. Kasus Investasi PT TFJ di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari memberikan indikator pada pihak swasta akan sulitnya investasi di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Daerah seolah-olah belum mampu memfasilitasi kepentingan para aktor yang merasa dirugikan hadirnya perusahaan. Kiprah pemimpin informal dan para free reader belum mampu disinkronkan dengan berbagai investasi swasta di Kabupaten Pandeglang. Kondisi konflik tersebut karena masing-masing aktor memiliki kepentingan terhadap potensi sumber daya alam (SDA) di Desa Cadasari yang melimpah serta perbedaan kepentingan aktor yang tidak dapat dielaborasi. Hal tersebut berbeda dengan konflik di Kota Surabaya yang relatif dapat diredakan oleh Pemerintah Daerah (Aminah 2015).

Oleh karena itu, Bupati Pandeglang melalui sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang bersama beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang perlu melakukan evaluasi terhadap sistem perizinaan bagi sektor swasta di Kabupaten Pandeglang. Secara spesifik, Pemda Kabupaten Pandeglang perlu mempermudah perizinan bagi wirausaha pemula.

Mengacu pada kriteria pengembangan pasar kerja dalam kebijakan penurunan pengangguran, maka diperoleh strategi prioritas sesuai Tabel 6.

Tabel 6: Bobot setiap Strategi dalam Kriteria Pengembangan Pasar Kerja

Kriteria	Bobot	Prioritas
Informasi Kerja	0.651	1
Pembinaan, pengendalian dan penataan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	0.349	2

Consistency ratio = 0.00

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR)* < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. Berdasarkan Kriteria pengembangan pasar kerja, strategi yang menjadi prioritas utama yaitu informasi kerja dengan bobot sebesar 0.651. Strategi prioritas kedua yaitu pembinaan, pengendalian dari penataan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja dengan bobot sebesar 0.349.

Masyarakat pencari kerja sangat membutuhkan informasi peluang tenaga kerja. Era revolusi industry 4.0 menunjukkan informasi menjadi faktor produksi utama dalam menentukan keunggulan bersaing seseorang maupun perusahaan. Teori Economic of information menunjukkan bahwa penguasa dunia adalah pihak yang mampu memperoleh informasi seakurat mungkin dengan biaya yang murah. Teori ini membantah berbagai hipotesis dari mazhab klasik dalam ekonomi yang diagungkan para pencetusnya seperti adam smith, yang menyampaikan bahwa informasi dalam pasar selalu sempurna padahal pasar sering menghadirkan *asimetric information*.

Adapun peran dinas/instransi yang terkait dengan strategi dalam upaya pengembangan pasar adalah sesuai Tabel 7.

Tabel 7 : Peran / Instansi Strategi Pengembangan Pasar Kerja

Dinas/Instansi	Tugas Dinas/Instansi
Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Mengembangkan dan mengintensifkan publikasi lowongan kerja secara berkelanjutan melalui website dan media informasi yang terintegrasi dengan pihak swasta, pencari kerja dan dinas terkait, hususnya Dinas Tenaga kerja, DPMPD, Kecamatan dan desa.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menfasilitasi Pelatihan peningkatan kompetensi calon TKI, Kemudahan perizinan bagi calon TKI kompeten dalam membuat perizinan agar terserap kerja.

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Strategi penurunan pengangguran dengan basis kriteria pengendalian penduduk diperoleh strategi prioritas adalah sesuai Tabel 8.

Tabel 8: Bobot Setiap Strategi Terhadap Kriteria Pengendalian Penduduk

Kriteria	Bobot	Prioritas
Penyediaan SDM dan Fasilitas KB	0.431	2
Pembinaan Perilaku Masyarakat	0.569	1

Consistency ratio = 0.00

Sumber: Data Primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil diperoleh *Consistency Ratio (CR) < 0.10* artinya jawaban pakar telah konsisten. Berdasarkan kriteria pembinaan perilaku masyarakat, strategi yang menjadi prioritas utama yaitu pembinaan perilaku masyarakat dengan bobot sebesar 0.569. Strategi prioritas kedua yaitu penyediaan SDM dan fasilitas KB dengan bobot sebesar 0.431.

Masyarakat di Indonesia kini sudah tidak terlalu tertarik lagi dengan slopan cukup dua anak, mereka lebih memandang kebijakan kependudukan lebih diarahkan pada kualitas penduduk, yaitu melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perubahan strategi dari kebijakan yang berorientasi pada meminimalkan pendudukan kepada peningkatan kualitas penduduk, dengan melakukan pembinaan perilaku masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis dan berorientasi pada kesejahteraan dan kualitas hidup.

Adapun peran dinas/instansi dalam strategi dengan basis kriteria pengendalian penduduk adalah seperti tabel 9.

Tabel 9: Peran Dinas/Instansi Strategi Pengendalian Penduduk

Dinas/Instansi	Tugas Dinas/Instansi
DP2KBP3A	<ul style="list-style-type: none">Melakukan intensifikasi penyuluhan tentang kualitas keluarga dan membangun kemandian ekonomi.Memberikan keterampilan pada kaum perempuan untuk menjadi entrepreneur.
Dinas Sosial	Intensifikasi Penyuluhan dan pendampingan tentang kemandirian keluarga pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam program keluarga harapan (PKH)

Sumber: Data primer, diolah (2019)

3. Peran Kelembagaan dalam strategi penurunan pengangguran

Upaya penurunan pengangguran tidak bisa diserahkan pada unsur pemerintah saja tetapi perlu melibatkan berbagai kalangan baik pihak swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/OKP dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keberadaan berbagai elemen masyarakat ini sangat membantu dalam upaya penurunan pengangguran. Para pakar setidaknya mengusulkan kelembagaan penurunan pengangguran tersebut dalam bentuk badan adhoc yang melibatkan berbagai dinas/instansi pemerintah daerah pandeglang yang terkait dengan upaya penurunan pengangguran serta seluruh stakeholder terkait. Kelembagaan tersebut menurut pakar minimal perlu melibatkan tiga pihak di luar pemerintah daerah, yaitu pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perguruan tinggi. kelembagaan tersebut dirasakan urgen dengan melibatkan OPD lintas dinas/instansi, maka perlu dipimpin oleh birokrasi level paling atas seperti Sekretaris Daerah yang dapat mengarahkan berbagai dinas/instransi.

Adapun susunan Badan Adhoc Penurunan Pengangguran adalah sebagai berikut:

- Penanggung jawab : Bupati Kabupaten Pandeglang
Wakil Bupati Kabupaten Pandelang
- Ketua : Sekda Kabupaten Pandelang
- Sekretaris I : Asisten Daerah I (Asda I)

- Sekretaris II : (Membina dan Mengawasi Bidang I)
Asisten Daerah 2 (Asda II)
(Membina dan Mengawasi Bidang II)
- Sekretaris III : Asisten Daerah 3 (Asda III)
(Membina dan Mengawasi Bidang III)

Bidang-Bidang:

- Bidang I : Peningkatan kompetensi Kerja dan Entrepreneurship
Ketua : Unsur Swasta (Pengusaha)
Anggota : 1. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2. Dinas Koperasi dan UMKM
3. Perguruan Tinggi
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Sosial
6. DPMPD, Kecamatan dan Desa
- Bidang II : Perluasan Kesempatan Kerja dan Investasi
Ketua : DPMPTSP
Anggota : 1. BUMN
2. Swasta
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi SDM
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Pertanian
- Bidang III : Pengembangan Pasar Kerja dan Ekonomi Kreatif
Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Anggota : 1. Diskomsantik
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan energi
3. Dinas Koperasi dan UMKM
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas DP2KBP3A

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pengangguran bukan hanya faktor terbatasnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya modal usaha tetapi faktor etos kerja yang rendah (karakter malas) akibat kesalahan dalam memahami doktrin agama tentang ridha (menerima kondisi

apapun).

2. Strategi prioritas dalam penurunan pengangguran mengacu pada kriteria: Pertama peningkatan kompetensi tenaga kerja; Kedua, Perluasan kesempatan kerja; Ketiga, Pengembangan Pasar Kerja; Keempat, Pengendalian penduduk.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemda Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Pemuda dan olahraga mengadakan pelatihan dalam bentuk motivasi perubahan mindset dan pengembangan entrepreneurship bagi para pemuda, pencari kerja dan penganggur.
2. Pemda Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan mempermudah perizinan dan akses permodalan bagi wirausaha pemula.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sebaiknya membentuk Badan Adhoc penurunan pengangguran dengan melibatkan berbagai Dinas/instansi terkait serta unsur swasta (wirausahawan), BUMN dan Perguruan Tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang yang telah menyediakan dana penelitian. Tulisan ini merupakan salah satu hasil dari penelitian tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kalangan yang telah membantu penelitian ini.

REFERENSI

- Aminah S. 2015. Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. Masyarakat: *Jurnal Sosiologi*, 20 (1): 59-79.
- Aqil, Muhammad dkk. (2014). Determinants Of Unemployment In Pakistan. *Ejournal of Physical and Social Sciences*, Vol. 4(4).
- Budiani, Ni Wayan. 2013. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial, INPUT*. Vol. 2 (1):49-57.
- [BPS Provinsi Banten] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2018. Banten dalam angka. Banten (ID): BPS
- [BPS Provinsi Banten] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2018. Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten (ID): BPS

- Fachri S. 2018. Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang). *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol.2 (1).
- Gubernur Banten. 2017. Surat keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.442-Huk/2017, tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Hakim AL. 2019. Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sawala* Vol. 01.
- Ikhsan M. 2004. Mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah: peran usaha kecil dan menengah. *Jurnal analisis sosial*, Akatiga, Jakarta.
- Irpan, Hamidah Muhd dkk. 2016. Impact of Foreign Direct Investment on The Unemployment Rate in Malaysia. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 7 (10) : 1-10. Doi:10.1088/1742- 6596/710/1/012028.
- Kistina, A. 2012. Standarisasi Kompetensi sebagai upaya perlindungan TKI. Diakses dari portal www.garuda. Org pada 16 November 2018.
- Romhadhoni P, Faizah DZ, Afifah N. 2018. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*. Vol. 14 (2): 115–121.
- Rizka, M. A. (2014). Evaluasi Implementasi Program Kursus Wirausaha Desa (KWD) untuk Mengatasi Pengangguran. *Jurnal Kependidikan*, 13(4), 369-381.
- Safina L dan Rahayu SE. 2011. Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 11(01).
- Saaty TL. 1993. Pengambilan keputusan bagi para pemimpin: proses hirarki analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks (terjemahan). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Seran S. 2017. Hubungan antara pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 (2): 59-71.
- Singgaleng YA. 2020. Intensification of social capital through ritual capital in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 08 (01): 82-104. DOI: 10.22500/8202029421
- Yazid, Muhammad. 2007. Agama dan Etos Kerja: Studi Analisis Terhadap Paham Keagamaan dan Prilaku Ekonomi. *Al-Qānūn*, Vol. 10 (2).
- Hartina, Dewi. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terselubung Di Perdesaan Jawa Tengah (Analisis Data Sakernas 2007). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol IV (I).